



PT MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 2 Februari 2023

No. : 015.1/MHI-VLK/II/2023
Perihal : Keputusan Survailen IV VLK

Kepada Yth.

Direktur **PT Henrison Iriana**

Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong,
Provinsi Papua Barat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 Januari 2023 di PT Henrison Iriana, Rekomendasi Reviewer dan Pengambil Keputusan pada tanggal 2 Februari 2023, maka LVLK PT Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.2.
2. **Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Henrison Iriana No. 0017/MHI-VLK** dinyatakan masih berlaku sampai dengan tanggal **24 Januari 2025**, dengan ruang lingkup :
 - a. Pemegang Izin : PT Henrison Iriana
 - b. Lokasi Pabrik : Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong
Provinsi Papua Barat
 - c. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK.61/MENHUT-VI/BPPHH/2006 Jo. S.137/BPPH-I/2009
dan NIB No. 0220102281634
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Veneer (180.000 m³/tahun), Kayu Gergajian (81.000 m³/tahun)
Kayu Lapis (612.000 m³/tahun)
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 12 bulan sekali. Survailen berikutnya akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT MUTU HIJAU INDONESIA

Vysca Arryani Mutu Hijau Indonesia
Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), Kementerian LHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Provinsi Papua Barat
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XVI, Monokwari, Papua Barat
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

